

**ARTIKEL PENELITIAN HIBAH BERSAING**



***COMMUNITY ARCHITECTURE* DALAM PENGELOLAAN RUANG PUBLIK  
DI PERMUKIMAN KAMPUNG-KOTA**

***(Studi Kasus Ruang Publik di Daerah Bantaran Sungai Cihalarang Kelurahan  
Sukapada Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung)***

Oleh:

Lilis Widaningsih, SPd.,MT.

Dra. Tjahyani Busono, MT.

E. Krisnanto, ST.,MT.

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
OKTOBER 2007**

## **Community Architecture dalam Pengelolaan Ruang Publik Kampung-Kota**

*(Studi Kasus: Ruang Publik di Daerah Bantaran Sungai Cihalarang Kelurahan Sukapada Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung)*

**Oleh:**

***Lilis Widaningsih, Tjahyani Busono, dan E. Krisnanto<sup>1</sup>***

### **Abstrak**

*Tulisan ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang mengkaji tentang desain ruang publik bagi masyarakat pinggiran kota yang secara fisik keruangan tidak lagi memiliki ruang publik yang memadai. Di tengah-tengah keterbatasan lahan tersebut, perlu kembali digali sejauh mana potensi-potensi fisik dan sosial yang masih dimiliki komunitas masyarakat kampung kota untuk dapat dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan yang partisipatif dalam pengadaan ruang publik.*

*Pendekatan yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) atau Meneliti dan Membangun Bersama (MMB). Dengan mengembangkan paradigma community architecture dan community based development dalam proses perancangan maupun pembangunan menjadi dasar dalam menggerakkan dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat.*

*Temuan penelitian merupakan gambaran karakteristik ruang publik kampung serta bagaimana pola penggunaannya oleh masyarakat. Dari temuan tersebut dibuat model pemberdayaan dan kerangka desain yang dapat dikembangkan dalam pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan ruang publik.*

### **Pendahuluan**

Peran ruang publik bagi masyarakat kampung kota sangat penting, selain menyangkut tata ruang fisik lingkungan, ruang publik juga mengemban fungsi dan makna sosial dan kultural yang sangat tinggi. Namun, pertumbuhan kota yang cepat menyebabkan tuntutan kebutuhan lahan perkotaan makin meningkat. Komersialisasi lahan termasuk di permukiman kampung kota pun tidak dapat dihindari. Privatisasi lahan baik secara individual maupun badan hukum/lembaga telah menyebabkan eksistensi ruang publik makin terpinggirkan. Bahkan di permukiman-permukiman padat penghuni, masyarakat sudah tidak memiliki lagi ruang publik yang memadai untuk mewedahi aktivitas mereka.

Di sisi lain, miskinnya ruang publik yang dapat menampung berbagai aktivitas bersama dikhawatirkan terjadinya berbagai masalah sosial kemasyarakatan

---

<sup>1</sup> Staf Pengajar Arsitektur pada Fakultas Kejuruan Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (FPTK UPI).

sebagai akibat dari kurangnya kebersamaan dan sosialisasi antarwarga. Masyarakat tidak lagi memiliki ruang bersama untuk saling berinteraksi, komunikasi antar warga, anak-anak tidak lagi memiliki tempat bermain di ruang luar, sehingga budaya kebersamaan dan toleransi semakin terkikis.

Untuk itu, tulisan ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang mengkaji tentang desain ruang publik bagi masyarakat pinggiran kota yang secara fisik keruangan tidak memiliki akses dan daya tawar terhadap lahan perkotaan. Di tengah-tengah keterbatasan lahan tersebut, perlu kembali digali sejauh mana potensi-potensi fisik dan sosial yang masih dimiliki komunitas masyarakat kampung kota untuk dapat dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan yang partisipatif dalam pengadaan ruang publik. Temuan penelitian merupakan gambaran karakteristik ruang publik kampung serta bagaimana pola penggunaannya oleh masyarakat. Dari temuan tersebut dibuat model pemberdayaan dan kerangka desain yang dapat dikembangkan dalam pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan ruang publik.

### **Ruang Publik: Tinjauan Teoritis terhadap Aspek Fisik dan Sosial**

Secara sederhana, yang dimaksud ruang publik adalah ruang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum sepanjang waktu, tanpa dipungut bayaran<sup>2</sup>. Lebih lanjut Danisworo mengatakan bahwa ruang publik tidak selalu berupa ruang terbuka hijau, akan tetapi suatu ruang dengan perkerasan seperti jalan raya maupun pelataran parkir, dapat menjalankan fungsi publik karena ruang tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum setiap waktu tanpa dipungut bayaran.

Menurut Stephen Carr dkk (1992:19) terdapat 3 (tiga) kualitas utama sebuah ruang publik, yaitu: tanggap (*responsive*), demokratis (*democratic*), dan bermakna (*meaningful*). Yang dimaksud tanggap (*responsive*) berarti bahwa ruang tersebut dirancang dan dikelola dengan mempertimbangkan kepentingan para penggunanya. Sedangkan demokratis (*democratic*) berarti bahwa hak para pengguna ruang publik tersebut terlindungi, pengguna ruang publik bebas berekspresi dalam ruang tersebut, namun tetap memiliki batasan tertentu karena dalam penggunaan ruang bersama perlu ada toleransi diantara para pengguna ruang. Pengertian bermakna (*meaningful*) mencakup adanya ikatan emosional antara ruang tersebut dengan kehidupan para penggunanya.

---

<sup>2</sup> Mohammad Danisworo, "Pemberdayaan Ruang Publik sebagai Tempat Warga Kota Mengekspresikan Diri, Kawasan Gelora Bung Karno". Makalah pada *Seminar dan Lokakarya Pemberdayaan Area Publik di Dalam Kota* yang diselenggarakan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), 2004.

## Desain Ruang Publik Partisipatif

Sejak tahun 1960-an di Amerika dan Eropa telah tumbuh gerakan menentang pendekatan perencanaan dan perancangan teknis-rasional yang dominan pada masa itu, serta juga memperjuangkan terbentuknya praktek profesional baru yang memiliki unsur moral dan politik, berkeadilan sosial, dan memberi kekuasaan pengambilan keputusan pada masyarakat (*citizen empowerment*). Gerakan ini kemudian menghasilkan beberapa paradigma perencanaan dan perancangan partisipatif seperti *Community Architecture* (Christopher dan Rossi, 2003).

Arsitektur merupakan produk budaya yang tidak terlepas dari manusia/masyarakat yang membuat dan menggunakannya. Perancangan arsitektur baik dalam skala bangunan/rumah tinggal maupun skala lingkungan/kawasan kota sudah seharusnya berorientasi pada kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat yang akan menggunakannya. *Community architecture* dalam proses perancangan maupun pembangunan sebuah lingkungan/kawasan kota menjadi dasar dalam menggerakkan dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Karena masyarakat dan kehidupannya merupakan realita sosial yang tidak boleh diabaikan, mereka merupakan potensi sekaligus pengguna setiap karya arsitektur, sehingga antara masyarakat dan rancangan arsitektur seharusnya memiliki kesesuaian. Dengan demikian program *community based development* merupakan bagian penting dari tugas seorang arsitek/perancang kota agar dalam setiap memulai rancangan memiliki dimensi sosiologi yang mampu menganalisis secara kritis pola perilaku masyarakat serta bagaimana menterjemahkannya menjadi sebuah produk arsitektur.

*Community based development* mengisyaratkan pentingnya pembangunan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, pola seperti itu memungkinkan partisipasi masyarakat dapat dikembangkan secara optimal. Partisipasi<sup>3</sup> merupakan pemberdayaan (*engagement*) dari kelompok sasaran (*affected group*) dalam satu atau lebih siklus project/program/kegiatan: desain, implementasi, monitoring, dan evaluasi.

Masyarakat diajak untuk berperan dan didorong untuk berpartisipasi karena masyarakat dianggap: (a) mereka mengetahui sepenuhnya tentang permasalahan dan kepentingannya/kebutuhan mereka, (b) mereka memahami sesungguhnya tentang keadaan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakatnya, (c) mereka mampu menganalisis sebab akibat dari berbagai kejadian di masyarakat (d) mereka mampu merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi, (e) mereka mampu memanfaatkan sumberdaya pembangunan (SDA, SDM, dana, sarana dan teknologi) yang dimiliki untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka mencapai sasaran pembangunan masyarakatnya yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, (f) anggota masyarakat dengan upaya meningkatkan

---

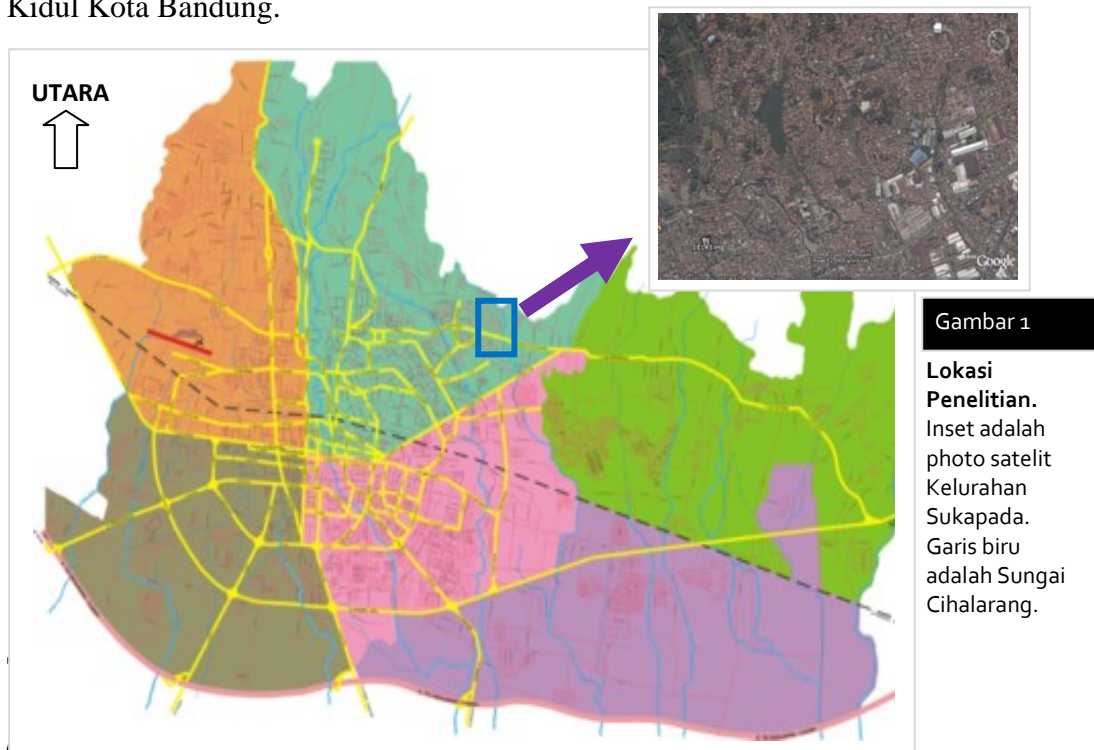
<sup>3</sup> Partisipasi masyarakat dilakukan dengan tujuan akhir dari pembangunan masyarakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya secara langsung dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

kemauan dan kemampuan SDM-nya sehingga berlandaskan pada kepercayaan diri dan keswadayaan yang kuat mampu mengurangi dan bahkan menghilangkan sebagian besar ketergantungan terhadap pihak luar.

## Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR) atau Meneliti dan Membangun Bersama (MMB). Perencanaan partisipatif juga akan dilakukan dengan teknik *participatory village planning* yang menggunakan FGD atau workshop. Teknik utama pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi (observasi data fisik dan observasi terlibat), *focuss group discusson* (FGD), dan survei dengan kuesioner tatap muka kepada responden rumah tangga.

Observasi fisik untuk mengidentifikasi karakteristik ruang publik dan penggunaannya oleh masyarakat kampung kota dilakukan di salah satu titik permukiman yang ada di sekitar Sungai Cikapundung, Sungai Cidurian dan Sungai Cihalarang Kota Bandung. Sementara sampel lokasi penelitian difokuskan di permukiman Babakan Baru RW 16 Kelurahan Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.

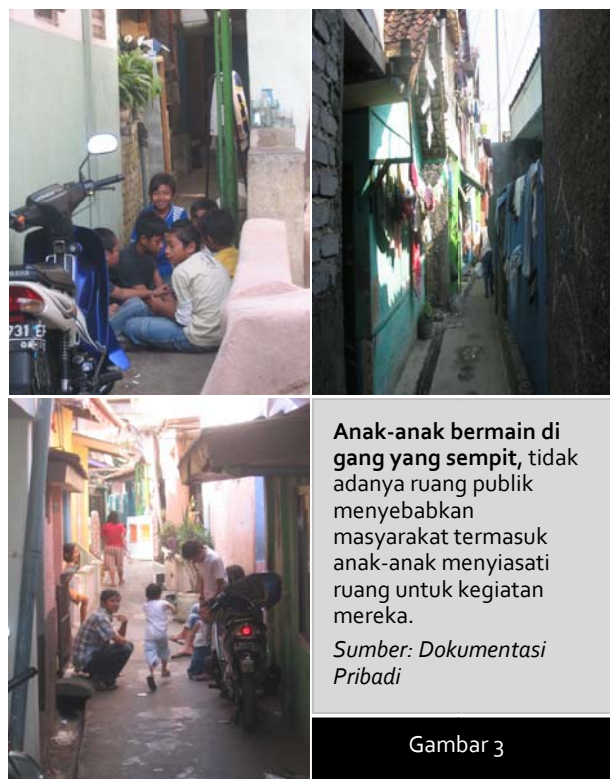


Secara umum, kondisi keterbatasan lahan pada permukiman kampung-kota, telah mendorong masyarakat untuk menyasiasi pola-pola penggunaan ruang/lahan untuk kegiatan kemasyarakatan mereka. Meskipun secara fisik, hampir di semua

permukiman kampung-kota tidak ada yang memiliki ruang publik yang memadai untuk menampung berbagai kegiatan masyarakat, namun masyarakat masih tetap melakukan aktivitas sosial mereka. Karakteristik ruang publik pada masing-masing permukiman secara fisik sangat dipengaruhi oleh keterbatasan ruang, tingkat kepadatan penghuni, lingkungan yang tumbuh yang umumnya “*unplanned*”, sosial ekonomi masyarakat, kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan serta faktor lainnya.

- *Jalan Lingkungan sebagai Ruang Publik*

Fungsi utama jalan adalah untuk jalur sirkulasi manusia dan kendaraan. Namun tidak demikian halnya jika di suatu *setting* tempat/lingkungan yang memiliki keterbatasan lahan, dengan tingkat kepadatan penduduknya yang tinggi, jalan memiliki multi fungsi. Selain sebagai fungsi sirkulasi, pada permukiman kampung-kota jalan sering digunakan untuk kegiatan sehari-hari masyarakat baik kegiatan individual maupun kegiatan bersama (sosial).



Di dalam ruang yang hanya berdimensi mulai dari 50 cm – 3.00 m tersebut termuat fungsi publik yang beragam, seperti pertukaran ekonomi dengan warung-warung kecil di pinggir gang, komunikasi sosial antar warga kampung, tempat bermain anak-anak dan aktivitas warga lain yang secara terus menerus membentuk satu ikatan emosional antar mereka. Pola hubungan masyarakat

seperti itu merupakan “modal sosial” pada komunitas mereka. Tidak heran apabila jalan lingkungan/gang yang berada di permukiman kampung-kota yang padat penghuni, banyak kegiatan yang saling tumpang tindih antara kegiatan *publik* dan kegiatan *private*<sup>4</sup> masyarakat yang sering dilakukan di jalan.

Longgarnya aturan formal yang mengikat mereka dalam pola penggunaan jalan, memungkinkan masyarakat untuk menggunakan jalan sebagai ruang *private* mereka sehingga banyak kegiatan-kegiatan individual yang seharusnya dilakukan di dalam ruang milik pribadi (rumah dan halaman) yang dilakukan jalan.

Pemandangan yang sangat biasa sering ditemukan di gang-gang sempit, misalnya masyarakat mengambil jatah pinggir jalan untuk menjemur pakaian, menyimpan barang-barang pribadi yang tidak tertampung di dalam rumahnya, memarkir motor dll. Kondisi semacam ini yang menyebabkan kaburnya batas publik dan privat di permukiman kampung-kota. Tapi justru di situlah salah satu karakteristik yang dimiliki masyarakat yang tinggal di permukiman kampung-kota.

- *Pemanfaatan Lahan Kosong/Lapangan Terbuka*

Di permukiman kampung-kota yang padat penghuni, sudah jarang ditemukan adanya ruang terbuka berupa lapangan atau taman yang representatif untuk menampung kegiatan masyarakat. Makin tingginya tingkat pertumbuhan penduduk serta migrasi penduduk desa ke kota menyebabkan tingkat hunian di perkotaan tumbuh tidak terkendali. Nilai lahan di perkotaan semakin mahal sehingga setiap jengkal tanah memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Masyarakat perkotaan pun makin mengkomersilkan lahan miliknya untuk kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai ekonomi, sementara mengesampingkan lahan/ruang untuk kegiatan bersama. Lahan terbuka yang tadinya berupa lapangan, sawah, kebun milik perorangan yang biasa digunakan bersama, kini sudah beralih menjadi lahan-lahan terbangun baik untuk hunian maupun fasilitas komersil.

Kalaupun masih ada lapangan terbuka yang dapat digunakan masyarakat, dapat dipastikan masa penggunaannya hanyalah sementara sampai batas waktu si pemilik mendirikan bangunan. Beberapa tahun yang lalu di Kelurahan Sukapada misalnya, setiap RW masih memiliki lahan terbuka untuk kegiatan olah raga seperti lapangan *volley ball*, lapangan bulu tangkis bahkan lapangan sepak bola. Selain kegiatan olah raga rutin yang biasanya dilakukan pada sore hari dan malam hari (misalnya untuk bulu tangkis), lapangan terbuka ini berfungsi pula sebagai tempat bermain anak-anak, kegiatan-kegiatan perayaan seperti memperingati hari ulang tahun kemerdekaan, Sholat *Ied* dan lain-lain yang membutuhkan ruang luas.

---

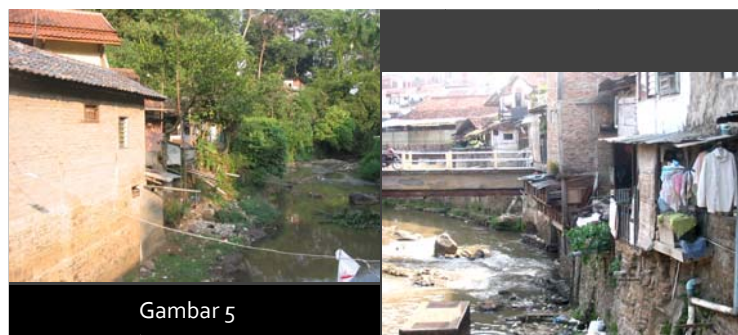
<sup>4</sup> Kegiatan privat adalah kegiatan yang seharusnya dilakukan di ruang privat yaitu suatu ruang yang diperuntukkan bagi aktivitas terbatas dan penggunaannya biasanya bersifat tertutup dalam suatu teritori tertentu berdasarkan kepemilikan secara legal oleh perseorangan maupun badan hukum. Dikutip dari Hariyono, Paulus, 2007: 134. “Sosiologi Kota untuk Arsitek”,

Akan tetapi, sejak tiga tahun terakhir, lapangan olah raga tersebut sudah beralih fungsi menjadi fungsi hunian seiring dengan perpindahan kepemilikan karena lahan tersebut dijual ke pihak lain.



- *Pemanfaatan Daerah Bantaran Sungai*

Daerah bantaran sungai merupakan lahan milik negara yang seringkali pemanfaatan dan penggunaannya tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Di Kota Bandung, penggunaan lahan bantaran sungai diatur dalam Perda No. 8 tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Perda No 20 tahun 2005, yang mengatur tentang batas kepemilikan negara atau garis sempadan air/sungai sesungguhnya tidak boleh dipergunakan/dimiliki perorangan/lembaga untuk kepentingan individu/ lembaga tersebut. Aturan tersebut menyatakan bahwa besarnya garis sempadan air/sungai (GSA) ditentukan oleh lebar serta debit air sungai. Artinya, tidak seorang pun baik perorangan maupun lembaga/badan hukum diijinkan untuk membuat bangunan pada daerah bantaran sungai.



Gambar 5

**Rumah-rumah penduduk di bantaran sungai.**  
*Lokasi: Pinggiran sungai Cikapundung. Sumber: Dokumentasi pribadi*



Dari observasi yang dilakukan di tiga titik permukiman sekitar aliran sungai (Cikapundung, Cidurian, dan Cihalarang), hanya sedikit saja daerah bantaran sungai yang masih berfungsi sebagai ruang publik. Dari beberapa daerah bantaran sungai yang masih berfungsi publik, kondisinya pun sangat memprihatinkan karena belum ditata secara memadai untuk kepentingan kegiatan masyarakat. Padahal dengan kondisi demikian, lahan bantaran sungai sangat rentan untuk dijadikan tempat tinggal ilegal oleh para pendatang yang tidak memiliki lahan.



Bangunan-bangunan yang berdiri di sekitar bantaran sungai tidak sebatas rumah gubuk, akan tetapi rumah-rumah permanen dengan lahan bersertifikat bahkan bangunan komersil yang berdiri di atas lahan yang luas pun dengan tenang seperti tidak bermasalah. Tentunya banyak persoalan yang tidak sederhana untuk diselesaikan pada saat ini, butuh suatu kebijakan yang komprehensif serta keterlibatan masyarakat luas untuk menyadari begitu pentingnya daerah bantaran sungai untuk kepentingan yang sangat luas dan jangka panjang.

- *Pemanfaatan Halaman Rumah & Ruang-ruang Milik Pribadi*

Keterbatasan lahan di permukiman kampung-kota, serta karakteristik masyarakat yang merupakan perpaduan budaya desa dan kota memungkinkan pola hubungan antar warga masih erat. Hal ini menyebabkan warga menyalurkan keterbatasan lahan tersebut dengan cara menggunakan ruang-ruang milik pribadi seperti halaman rumah atau teras untuk kegiatan bersosialisasi. Kebutuhan sosial setiap individu tidak dapat tergantikan oleh apapun, dan manusia butuh manusia lainnya untuk saling mengenal, berbagi atau sekedar *curhat*<sup>5</sup>.

<sup>5</sup> *Curhat* (curahan hati), sebuah istilah yang *trend* di kalangan remaja untuk berbagi, berkeluh kesah dengan teman sebagai bentuk pelepasan beban atau masalah yang dihadapi. Kaum perempuan baik remaja maupun ibu-ibu sering melakukan curhat dengan sesamanya, meskipun sebatas hanya sekedar ngobrol tapi secara psikologis, curhat dapat membantu seseorang dari penyakit “stress”/

Gambar 5

Teras dan halaman rumah yang digunakan sebagai ruang bersama.

Sumber:  
*Dokumentasi Pribadi*



Pemandangan yang sering ditemukan di komunitas permukiman kampung-kota, kaum perempuan (ibu-ibu dan remaja) memiliki tradisi tersendiri dalam bersosialisasi. Berkumpul untuk sekedar ngobrol di teras rumah setelah selesai mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, masak dan beres-beres rumah. Kegiatan ibu-ibu ini biasanya dilakukan pada waktu senggang seperti pagi antara jam 10.00 – jam 12.00 (setelah masak dan menjelang waktu dzuhur dan pulang sekolah anak-anak) atau pada sore hari selepas waktu ashar sampai menjelang magrib.

Kegiatan bersama terutama kaum ibu/perempuan selepas menyelesaikan pekerjaan di dapur atau mencuci, mereka biasanya menyempatkan diri untuk berkumpul di teras rumah dengan tetangga lainnya. Meskipun kegiatan mereka hanya *ngobrol* atau sambil mengasuh anak, tetapi secara sosial/kultural, kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk “modal sosial” untuk saling mempererat hubungan dan saling menjaga antar sesama warga.

### **Pola Pemanfaatan Ruang Publik Kampung-Kota**

Aktivitas masyarakat baik yang bersifat rutinitas individual maupun aktivitas kemasyarakatan pada setiap komunitas tetap harus dilakukan. Bagaimanapun minimnya ruang yang mewadahi aktivitas tersebut, masyarakat tetap harus menemukan solusinya agar proses-proses sosial tetap berlangsung di lingkungan mereka. Pada observasi terlibat, dapat diidentifikasi berbagai kegiatan masyarakat yang biasa dilakukan di lingkungan RW 16 yang melibatkan berbagai unsur.

Pada dasarnya pola pemanfaatan ruang publik ini dikategorikan untuk kegiatan yang bersifat:

- *Kegiatan formal*. Kegiatan formal/ publik yang dilakukan di area ini biasanya berasal dari legitimasi bahwa kegiatan bersama ini dapat/berhak menghentikan sementara semua aktivitas lain secara sementara. Pada saat acara lomba atau peringatan hari kemerdekaan dilakukan, jalan/gang biasanya ditutup warga sehingga

---

depresi karena merasa terasing dan tidak memiliki cara untuk menemukan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya.

para pejalan kaki atau kendaraan harus melewati jalan lain. Kegiatan formal lainnya dan paling sering dilakukan dalam ruang publik (ruang serba guna) adalah rapat atau pertemuan-pertemuan formal untuk musyawarah membahas masalah-masalah kemasyarakatan.



- *Kegiatan informal.* Kegiatan informal dilakukan karena ruang publik merupakan salah satu solusi bagi keterbatasan ruang pribadi yang ada, sehingga masyarakat terpaksa menjadikan ruang publik untuk berbagai aktivitas keseharian mereka yang tidak dapat dilakukan di ruang milik pribadi.

**Pemberdayaan: Aspek Ekonomi, Lingkungan, Kelembagaan dan Jaringan untuk Pengembangan Ruang Publik**

Masyarakat adalah kumpulan dari individu-individu, dengan karakter, latar belakang keluarga, budaya, pendidikan, agama yang berbeda-beda. Hidup dalam suatu komunitas masyarakat dihadapkan pada kompleksitas masalah, kesulitan, kekhasan, dan bahkan konflik yang multi dimensi. Himpitan masalah ekonomi keluarga yang tidak juga membaik, tekanan kehidupan kota yang makin tidak manusiawi, lingkungan yang sudah tidak lagi layak sebagai ruang hidup semakin mendorong ketidakberdayaan masyarakat untuk mengatasi dan keluar dari semua persoalan yang dihadapinya.

Membangun masyarakat yang berdaya, memiliki kepedulian, mau belajar dan berubah, memahami berbagai perbedaan, memiliki tujuan dan nilai komunitas yang dapat menjadi modal sosial untuk membangun lingkungan yang mereka tinggali merupakan proses panjang yang harus dilakukan. Untuk sebuah tujuan yang

sederhana harus dimulai dengan membangun kesadaran individu serta yang terpenting bagaimana setiap individu masyarakat memahami permasalahan, hak, kewajiban serta tanggung jawab sosialnya dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Pluralitas masyarakat perkotaan di satu sisi, sementara di sisi lain makin menurunnya tradisi kebersamaan, saling mempercayai dan saling berbagi diantara sesama menjadi tantangan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pendekatan konvensional dalam memecahkan berbagai masalah di masyarakat telah terbukti tidak efisien. Kaitannya dengan pembangunan lingkungan fisik sebagai ruang hidup manusia, pola-pola *top down* yang diterapkan selama ini telah menunjukkan bahwa perencana kota, penentu kebijakan memperlakukan lingkungan kota hanya sebatas “fenomena fisik” ketimbang “fenomena budaya”.<sup>6</sup> Masyarakat sebagai pengguna, pelaku dalam sebuah *place* merupakan dimensi yang paling penting dalam proses perancangan. Karena dalam masyarakat lah segala nilai-nilai budaya, pola perilaku, simbol dan karakteristik kehidupan sosialnya yang harus dijadikan dasar dalam merancang sebuah lingkungan/kawasan kota.

Penerapan paradigma *community architecture* paradigm yang dapat diterapkan untuk menjawab kompleksitas kehidupan masyarakat perkotaan. Sementara pemberdayaan masyarakat merupakan proses multi-disiplin, *multi-approach* dan harus simultan. Dimana dalam prosesnya, melibatkan multi-pihak (*multi stakeholder*) karena perubahan merupakan proses pergeseran hubungan antar individu, antar kelompok atau perubahan institusi. Karena itu, pemberdayaan memerlukan intervensi pada sejumlah faktor/elemen penting untuk dapat berlangsung, yang semua elemen ini tidak dapat berjalan sendiri-sendiri tanpa proses perubahan pada aspek lainnya. Pemberdayaan ini berfokus pada empat aspek: ekonomi, lingkungan, kelembagaan dan jaringan (*networking*).

#### *a. Penguatan Ekonomi Masyarakat*

Penguatan ekonomi masyarakat dengan kegiatan unit usaha yang dapat membantu kegiatan perekonomian masyarakat setempat. Ruang usaha yang disediakan baik secara sosial (kebijakan) atau fisik akan mendorong bagi pertumbuhan usaha, yang yang *aplicable* dalam skala kampung.

---

<sup>6</sup> Seperti dikatakan Danisworo dalam *Tabloid Agora, Vol. 01 Edisi 01 September 2007*, Pusat Studi Urban Desain (PSUD), “kelemahan yang sering dilakukan oleh perencana dan perancang kota adalah bahwa mereka lebih sering melihat kota sebagai “fenomena fisik” ketimbang “fenomena budaya”. Akibatnya, banyak dimensi lokal yang menyangkut nilai-nilai sosial budaya, esetika, sejarah, serta nilai-nilai simbolis lainnya yang disalahartikan, diabaikan, bahkan dianggap tidak penting di dalam proses perancangan.”



Gambar 5

Kelompok usaha PKK yang dibentuk sebagai bagian dari pemberdayaan perempuan menjual bahan kebutuhan pokok warga. Sumber: Dok. Pribadi

Terbuka luasnya akses atau ketersediaan infrastruktur fisik juga memberikan iklim yang lebih baik bagi ekonomi masyarakat. Desain lingkungan yang *aksesible* memungkinkan lalu lintas manusia menjadi lebih tinggi. Dan, desain arsitektur lingkungan semestinya dapat dijadikan salah satu metode intervensi yang dapat memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat.

*b. Aspek Lingkungan*

Aspek pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan lingkungan dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam mendesain lingkungannya (ruang publik) sesuai kebutuhan mereka, melaksanakan pembangunan, menggunakan dan yang terpenting bagaimana memeliharanya agar hasil desain tersebut *sustainable* (berkelanjutan).



Gambar 5

Kegiatan Bina Lingkungan dalam penataan lingkungan sekitar Bantaran Sungai Cihalarang. Pada gambar di atas terlihat para pemuda sedang mempersiapkan tong sampah dan memperbaiki pinggiran sungai. (Lokasi: Permukiman Babakan Baru RW 16 Kelurahan Sukapada. Sumber: Dok. Pribadi)

*c. Aspek Penguatan Kelembagaan Lokal dan Pendidikan Masyarakat.*

Aspek ini penting dilakukan sebagai upaya penanaman pemahaman bersama atas pentingnya lingkungan yang sehat yang dapat menunjang berbagai kegiatan kemasyarakatan serta bagaimana semua pihak baik secara individual maupun

kelembagaan memiliki tanggungjawab bersama terhadap keberlanjutan lingkungannya.

*d. Pengembangan Kelembagaan dan Pendidikan*

Institusi warga yang ada seringkali hanya berfungsi bagi kepentingan kultural dan sosial. Kelembagaan juga harus dapat menyediakan institusionalisasi nilai-nilai sosial yang penting yang dapat menyehatkan kehidupan sosial. Menumbuhkan kepercayaan antar warga, kerjasama, partisipasi misalnya membutuhkan kelembagaan. Keamanan lingkungan yang lebih tinggi misalnya sangat bermanfaat untuk menekan angka kriminalitas dan rasa aman. Yang terakhir adalah perlunya menelusuri aspek ketatapemerintahan (*governance*) di tingkat warga dalam lembaga warga atau lembaga pemerintahan terendah, karena program-program pembangunan tingkat lokal/warga seharusnya dikelola oleh mereka.<sup>7</sup>

*d. Aspek Pengembangan Jaringan (networking)*

Aspek ini merupakan penguatan jejaring kerjasama dengan lembaga/instansi formal (eksekutif dan legislatif), lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun swasta. Dalam pengembangan jaringan ini memungkinkan masyarakat mendapatkan akses yang lebih luas untuk bekerjasama dalam pembangunan lingkungan fisik dan sosialnya.



## **Pemberdayaan Ruang Publik dan Penguatan Modal Sosial**

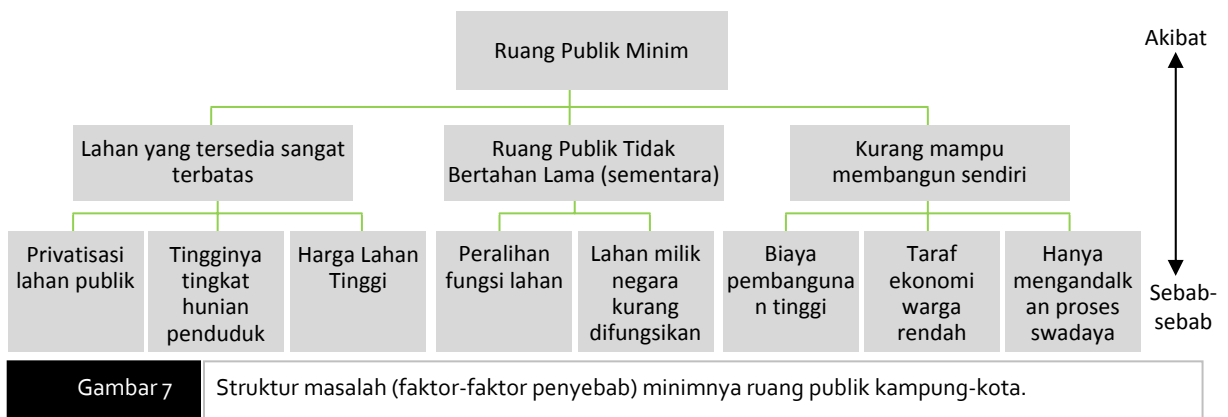
Sesuai fungsi yang lebih luas dari ruang publik sebagai ruang untuk kegiatan bersama warga, ruang aktivitas publik warga, ruang *clearence* masyarakat kampung-

<sup>7</sup> Salah satu contohnya adalah pembagian kompor dan tabung gratis yang merupakan program konversi energi pemerintah pusat, sangat memerlukan asas keadilan bahwa semua warga miskin mendapatkannya dan harus didahulukan. Program ini dilakukan oleh pejabat/pengurus RT/RW setempat.

kota, ruang aktivitas ekonomi, maka pemulihan ruang publik menjadi salah satu model intervensi perbaikan modal sosial. Sebagai bagian dari media aktivitas publik, ruang publik menjadi sarana bagi perencanaan pembangunan tingkat warga. Karenanya, perencanaan partisipatif dimulai dari ruang publik. Model pemberdayaan disusun dengan pendekatan *logical framework approach* (LFA),<sup>8</sup> yaitu metode yang menstrukturkan masalah dan kemudian menyusunnya dalam tujuan dan program. Model pemberdayaan disusun sebagai berikut:

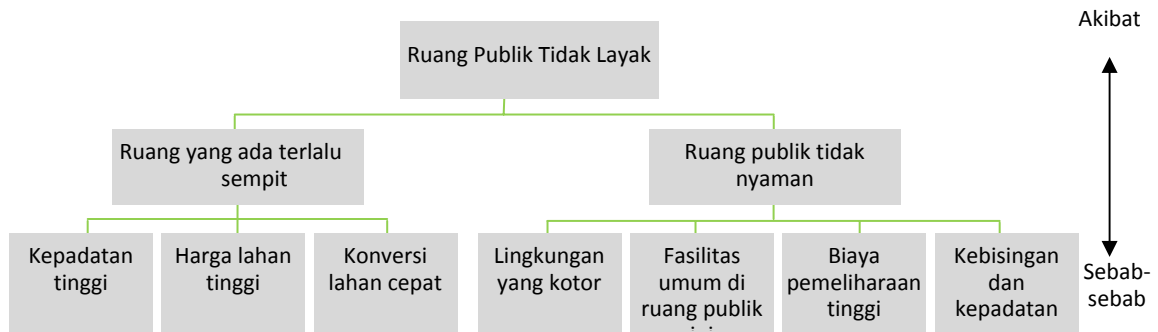
a. *Struktur Masalah*

Secara umum terdapat dua masalah ruang publik: minimnya ketersediaan ruang publik dan kelayakannya yang rendah. Seluruh masalah ruang publik di atas dapat disusun dan distrukturkan dalam bagan (pohon) masalah di bawah.



Minimnya ruang publik disebabkan oleh keterbatasan lahan di perkotaan (kampung kota), ruang publik banyak yang hanya bersifat sementara – sebelum dibangun oleh pemiliknya menjadi bangunan pribadi atau komersial, serta kurangnya dana untuk membangun sendiri ruang publik yang dibutuhkan.

<sup>8</sup> LFA ini sangat umum dipakai di banyak program di seluruh dunia. Semula diperkenalkan secara massal oleh Amerika sekitar tahun 1960-an dalam menyusun program untuk pembangunan Dunia Ketiga. Pemerintah Jerman melalui GTZ juga memperkenalkan metode serupa yang dikenal dengan ZOPP.



Gambar 8 Struktur masalah rendahnya kualitas ruang publik kampung-kota.

Sementara itu, ketidaklayakan ruang publik yang ada di area kampung-kota disebabkan oleh ruang publik yang ada yang terlalu sempit/kecil, serta kenyamanan yang rendah, yang disebabkan oleh lingkungan yang kotor, fasilitas umum yang rendah/minim, biaya pemeliharaan yang “cukup” tinggi serta kebisingan yang dikarenakan kepadatan penghuni/penduduk.

#### b. Strategi Pemberdayaan

Berdasarkan struktur permasalahan di atas, strategi untuk pemberdayaan dapat dikerangkakan seperti bagan di bawah. Dua tujuan utama pemberdayaan ruang publik adalah pengembangan ruang publik serta pemulihan atau perbaikan kualitasnya.

Untuk yang pertama, tujuan utama (*ultimate goal*), strategi (*intermediate goal*) dan output atau aktivitas yang harus dilakukan dapat dilihat dalam bagan di bawah. Pengembangan ruang publik didekati dengan tiga strategi, yaitu: penyediaan lahan alternatif atau perluasan, peningkatan status lahan publik sememara menjadi milik bersama (komunal), serta perlunya penyediaan dana dengan pengelolaan atau manajemen dana yang dapat digunakan warga untuk menyediakan/membeli sebuah ruang yang dapat dijadikan ruang publik yang lebih permanen.



Bagan 9 Strategi pengembangan ruang publik kampung-kota



Sedangkan pemulihan kualitas ruang publik dapat dikembangkan dengan lima strategi yaitu: perluasan area/pengembangan – karena sempitnya lahan membuat ruang publik kurang layak, (2) perbaikan sanitasi lingkungan, (3) penyediaan/perbaikan fasilitas publik seperti toilet, tempat sampah, papan informasi dll, (4) adanya pengelolaan sumber daya finansial/non-finansial secara bersama (*resources sharing*) untuk menjamin pemeliharaan, serta (5) perlunya pengaturan pemeliharaan ruang publik, tetapi ditentukan oleh masyarakat sendiri (*self-regulation*).

## Kerangka Desain

**Tabel 1.** Kerangka Desain Ruang Publik Kampung-Kota di Lokasi Penelitian

No	Aktivitas	Rincian Aktivitas	Output
1	Merencanakan ( <i>plan</i> ) dan merancang ( <i>design</i> ) ruang publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan observasi terfokus di lokasi yang akan didesain</li> <li>Mengidentifikasi ulang kebutuhan ruang aktivitas masyarakat</li> <li>Uji kelayakan lokasi yang memenuhi persyaratan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan sekitar sungai</li> <li>Menghitung kebutuhan material</li> <li>Membuat gambar rancangan ruang publik</li> </ul> <p>Catatan: proses ini dilakukan dengan keterlibatan peneliti sekaligus perancang/arsitek dan masyarakat setempat</p>	<p>Gambar desain ruang publik:</p> <p><i>Konsep:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Analisis tapak</li> <li>matriks kebutuhan ruang aktivitas</li> <li>sketsa pola perilaku pengguna</li> </ul> <p><i>Gambar kerja:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rancangan tapak/site</li> <li>Potongan site</li> <li>Potongan site tiap segmen</li> <li>Struktur dan konstruksi</li> <li>Rancangan sistem drainase lingkungan</li> <li>Rancangan <i>armature/street furniture</i> (kelengkapan ruang luar)</li> <li>Gambar Detail</li> <li>Spesifikasi teknis</li> </ul>
2	Penerapan Desain Ruang Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penataan dan perbaikan jalan lingkungan</li> <li>Pembuatan konstruksi dinding sungai (kirmir) bekerjasama dengan dinas pengairan Kota Bandung</li> <li>Penataan bantaran sungai untuk jalur hijau (penghijauan lingkungan) bekerjasama dengan Dinas Pertamanan Kota Bandung dan LSM lingkungan</li> <li>Pengerjaan kelengkapan ruang publik yang dilakukan oleh masyarakat setempat dengan material yang ramah lingkungan</li> <li>Penataan sistem pembuangan limbah rumah tangga dengan pembuatan septik tank komunal bekerjasama dengan BPLH Kota Bandung</li> <li>Penyediaan pekerja ahli (tukang) yang mengerjakan kirmir (masyarakat setempat yang memiliki keahlian)</li> <li>Penyediaan pekerja pendamping dari masyarakat yang membantu pekerjaan konstruksi</li> <li>Pelaksanaan kerja bakti terjadwal untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tertatanya jalan lingkungan di lahan bantaran sungai yang dapat berfungsi sebagai jalur sirkulasi dan ruang publik.</li> <li>Tertatanya penghijauan (taman, apotik hidup, dapur hidup) di lahan bantaran sungai dan permukiman sekitarnya</li> <li>Tersedianya ruang publik dengan kelengkapan fasilitas untuk kegiatan masyarakat (tempat duduk, alat-alat bermain anak, lahan parkir, tempat berjualan non permanen dll.).</li> <li>Tertatanya sistem drainase lingkungan dan sistem pembuangan limbah rumah tangga dengan septiktank komunal</li> </ul>

## DAFTAR PUSTAKA

- Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian Action (ALNAP) (2003), *Participation by Crisis-Affected Populations in Humanitarian Action, A Handbook for Practitioners* ([www.alnap.org](http://www.alnap.org))
- Adisasmita, Rahardjo (2006), *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan: Konsep dan Model Community Development*. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS), (2006), *Laporan Studi Modal Sosial*.
- Carr, Stephen; Francism Mark; Rivlin, Leane; Stone, Andrew (1992), *Environment and Behavior Series. Public Space*. Cambridge University Press.
- Danisworo, Mohammad (2004), *Pemberdayaan Ruang Publik Sebagai Tempat Warga Kota Mengekspresikan Diri , Kawasan Gelora Bung Karno*. Makalah pada Seminar dan Lokakarya Pemberdayaan Area Publik di Dalam Kota yang diselenggarakan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI).
- Day, Christopher (2003), *Consensus Design Socially Inclusive Process*, London: Architectural Press.
- Francis Fukuyama (1995), *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*, London: Hamid Hamiltond Ltd.
- Hariyono, Paulus (2007), *Sosiologi Kota untuk Arsitek*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Healey, Patsy, *et. al* (ed.) (1995), *The New Urban Context, Managing Cities*. John Wiley & Sons.
- Inoguchi, Takashi; Newman, Edward; Paoletto, Glen (ed.), (2003), *Kota dan Lingkungan: Pendekatan Baru Masyarakat Berwawasan Ekologi*, Jakarta: LP3ES.
- Khudori, Darwis (20002), *Menuju Kampung Pemerdekaan: Membangun Masyarakat Sipil dari Akar-Akar, Belajar dari Romomangun di Pinggir Kali Code*, Yogyakarta: Yayasan Pondok Rakyat.
- Kompas (2006), *Politik Kota dan Hak Warga Kota*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

- Laurens, Joyce Marcella (2004), *Arsitektur dan Perilaku Manusia*, Jakarta: Penerbit Grasindo.
- Putnam, Robert (2000), *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*, New York: Simon and Schuster.
- Setiawan, Mobi B (2004), *Ruang Publik dan Modal Sosial: Privatisasi dan Komodifikasi Ruang di Kampung*. Makalah pada Seminar dan Lokakarya Pemberdayaan Ruang Publik di Dalam Kota, Ikatan Arsitek Indonesia.
- The World Bank (1996), *The World Bank Participation Sourcebook*, Washington DC, see [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org)
- Wiriyomartono, A. Bages P (1995), *Seni Bangunan dan Seni Bina Kota di Indonesia*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Zahnd, Markus (1999), *Perancangan Kota Terpadu, Teori Perancangan Kota dan Penerapannya*. Yogyakarta: Kanisius.



Kesimpulan:

# Community Architecture Approach in Sub-Urban Public Space Management

## *Revitalizing for Poor Community's Public Space*<sup>1</sup>

Lilis Widaningsih, Tjahyani Busono, and E. Krisnanto<sup>2</sup>

### Abstract

*This paper based on our research on public space design for suburban area – kampung-kota area, that physically has no adequate space for public purposes. In this shortage of space condition, it is necessary to recover physical and social resources and potencies in the community kampung-kota area by participatory approach in acquisition and designing of public space.*

*We deploy Participatory Action Research (PAR) by developing community architecture paradigm and community based development in design process or development for encouraging community participation.*

*Research found out public space characteristic in kampung-kota area and patterns of public space usage. By these findings we develop empowerment model and design framework for acquisition, developing, utilizing and maintaining kampung-kota public space.*

Key terms: public space, community architecture, empowerment, participation.

### Introduction

Public space has an important role in *kampung-kota* (suburban) community, not only in correspondent with physical space environment, but also functions and contents in social and cultural dimension on community. Fast growth of city may causes increasing of spacial demand significantly.

In this era, commercialization of land in *kampung-kota* area can not be avoided, and land privatization phenomenon that caused by individual or institution relegates open space availability. Consequently, in suburban area, community has no more land for public space to cover social activities.

Lack of public space tends to advocates social disintegration and dis-sociability. Public space is required to mediates spacial aspect to communicate, interact, playing, and recreation in a community, and instead, short supply of public space may deteriorates culture and tolerance.

This paper is arranged based on our research on public space design in a suburban area in Bandung, that called as "*kampung-kota*" area. *Kampung-kota* is

---

<sup>1</sup> The paper is based on our cases study of "*Implementation of Public Space Design Model on Riverside Area in Kampung-kota Community: A Recovering Model for Poor Community Social Capital*", a program funded by Competition Grant (*Hibah Bersaing*) Program of Higher Education Directorate General of Department of Education - GOI.

<sup>2</sup> Architectural Lecturer in Faculty of Vocational and Technology Education, Bandung Indonesian Education University.

usually dominated by the low access resident and low bargaining position to urban land competition, an area that physically is located in an urban but culturally is categorized by rural characteristics. Typically, as a suburban area, *kampung-kota* usually is a slum area, and economic characteristic is dominated by the poor, and the shortage of land tends to pressure public space availability. The research tries to find out the characteristic of public space for *kampung-kota* and identifies the pattern of public space usage, and continued to develop a model for management and empowerment of public space for poor community. The management and empowerment model is used to identify of developing, utilizing and maintenance of public space in *kampung-kota* area.

### **Public Space: Theoretic Perspective of Physical and Social Aspect**

Traditionally, public space is a space that the people can use in free of charge free in indefinite period of time.<sup>3</sup> And, public space is usually not only correspond to by open green space, but also represented to built area such as car park area, access road, park, boulevard, sidewalk or any space that the community can use in long period by no charged.

Public space must be in its quality of function, that public space has to cover the attributes of responsive, democratic, and meaningful (Carr et al, 1992: 19). In responsive meaning, public space may adaptive to the user's need and interest, democratic means that public space provides an opportunities for free space to expression, and meaningful of public space covers utility aspect of community's need.

### **Participative Design in Public Space**

Historically, in architecture, since 1960s, in United States and Europe, grew a movement to fight technical-rational planning and design, and this movement advocate a new professionalism practices in architecture. Architecture has to have a moral and politic aspect, more social equality and should be adaptable to community decision (citizen empowerment). Then, the movement created some paradigms of participatory design such as called of 'community architecture' (Christopher and Rossi, 2003).

By this perspective, architecture is defined as cultural product that cannot be separated to the community that designs and uses architecture process. Architectural design in housing or in environment/urban scale should contain orientation to community need and values. It is an inherent factor in *community architecture* that architecture as a mean for social or participation tool in a community. Pressure to

---

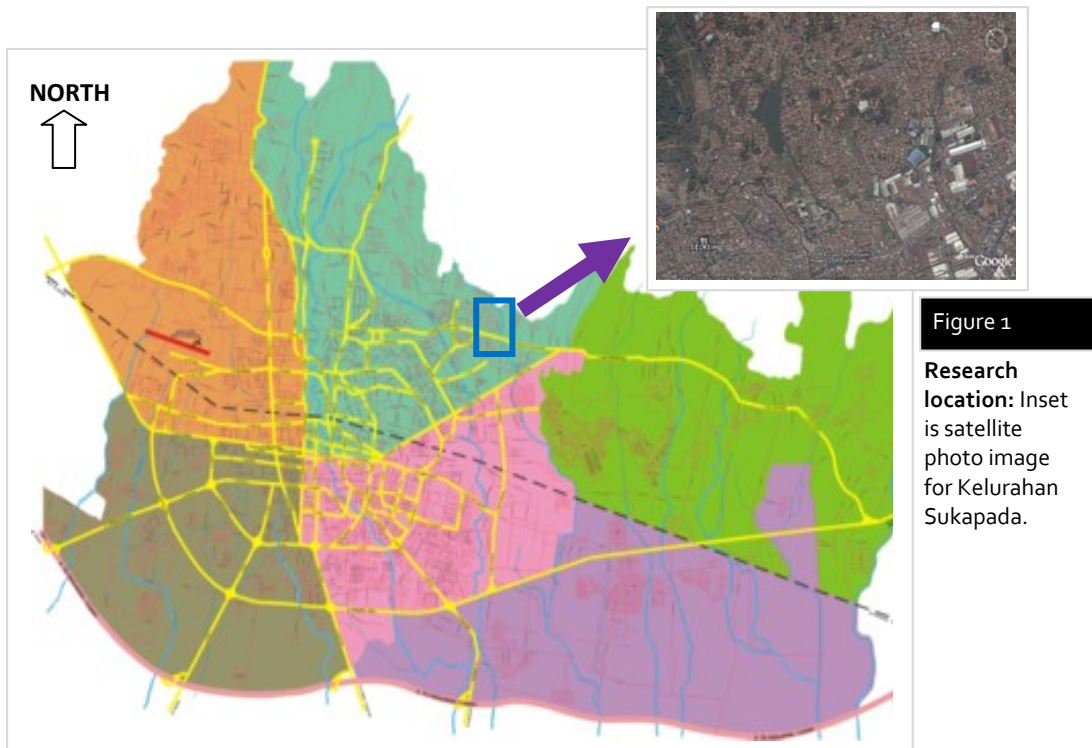
<sup>3</sup> See Mohammad Danisworo, "*Pemberdayaan Ruang Publik sebagai Tempat Warga Kota Mengekspresikan Diri, Kawasan Gelora Bung Karno*". Paper presented on *Seminar dan Lokakarya Pemberdayaan Area Publik di Dalam Kota*, Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), 2004.

more suitable between architecture design and human aspect, may put architecture product in a position that can not be separated from society as the user. Therefore, community architecture in design and development could be a method for community participation or empowerment. The term of *community based development* must be adopted on the architect tasks, to make architectural design has a more social dimension and more appreciative to community's norms and behavior, and should be translated in his/her architectural products.

So, community based development requires the development process based on community need. Community based development provides participation process to adopt develop community potencies, participation is an engagement process for community or affected group in design, implementation, and evaluation process in development. This approach assumes that the community knows their needs and problems, has comprehensive information to their economic and social condition, and can predict for the consequences from their activities or actions taken.

## Research Method

The research tries to employ *participatory action research* (PAR) by utilizing participatory method such as focus group discussion (FGD), workshop and other community forum, as well as uses non-participatory assessment methods, primarily, observation and household survey. We used physical observation method to identify characteristic of public space in *kampung-kota* area, but focuses in waterside area at *Sungai* (River) Cikapundung, *Sungai* Cidurian, and *Sungai* Cihalarang.





The study tries to find the problem and opportunity to develop waterside as a public space to facilitate the poor has a more access to public space. Our study carried on RW 16 Kelurahan Sukapada, Kecamatan Cibeunying Kidul, Bandung City, started in March 2007. By PAR method, participative process would explore the opportunity of community access to develop and manage its own public space.

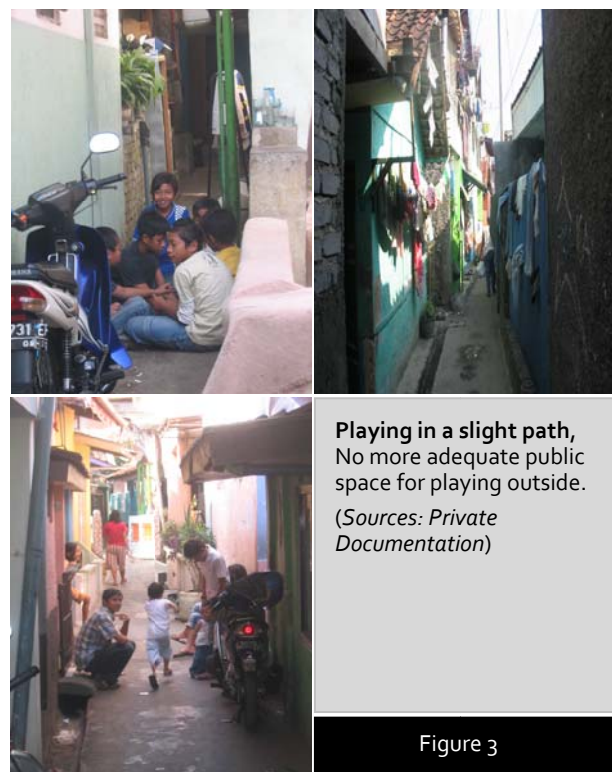
## Research Finding

Low access to land in urban area, forced the community to wile land usage area for social activities. Even though almost in *kampung-kota* area, physically there is no adequate space, but it is impossible to community to negate their social activities, but the pattern of public space is influenced by lack of space condition or special patterns available, population density, housing that tend developed in natural pattern, economic and other social cultural factors.

### *Characteristic of Public Space in Kampung-Kota Area*

- *Access Road as A Public Space*

The main function of access road is for human and vehicles circulation. But it is differed in that low access in land setting area. In high dense population and housing, access road, in contrast, even if, has many functions. As well for circulation path, community uses access road for household, economic and social activities.



In our observed locations, access road ranges from 50 cm to 3 m, but in higher dense location, narrower the path. Pattern of access road follows as a tree configuration, more depth, the path width are smaller. In these areas, access road holds public, communal and private functions, and provides social and economic activities. Community carries out its economic activities, such as small store, informal business, and other informal economic sector activities, as well as many household activities such as cleaning appliances (cooking tools), playing, relax, or baby care. Because of lack space, access road provides a media for community to interact each other, as a social room for facilitate social relation between community members; community uses access road as communication media in neighborhood relation. In *kampung-kota* as a typical of slum area, community carries out a complex relation between public and private<sup>4</sup> activities.

Loose of formal regulation will tighter individuals in usage of access road, allows community to uses access road as a private space, even though, these activities should be carry out in domestic area (house room or frontage parks). Frequently, we can see that access road is frequently used for drying cloths, or put household tools or parking motor cycles, consequently, make access road is more difficult as a circulation path. This condition causes the border of private and public domain more obscure, as a characteristic of shelter community in *kampung-kota* area.

- *Using of Open Space/Squares as Public Space*

Other, in high density area, is rare to find representative open space or open squares for community activities. Fast growth of population and urbanization forces ordinary shelter growth uncontrollable and invokes price of land raised significantly and every square is very expensive.

People tend to commercialize their land for economic purposes, but denying the space for collective activities. If there is an open space, generally, this collective function for space is temporary until the owner builds its land for building. In previous period, in Kelurahan Sukapada, every RW<sup>5</sup> (neighborhood) has open space for community sport activity such as volley ball, badminton, or football, but in recent time, space for public activities more scare.

Besides for routine sport activities, community uses open space for formal activities such as nation birth day celebration, or for ritual activity such public pray (e.g. *Sholat Ied*) that need wider space. But in recent years, space for community sport has been converted to housing caused by transfer of land entity.

---

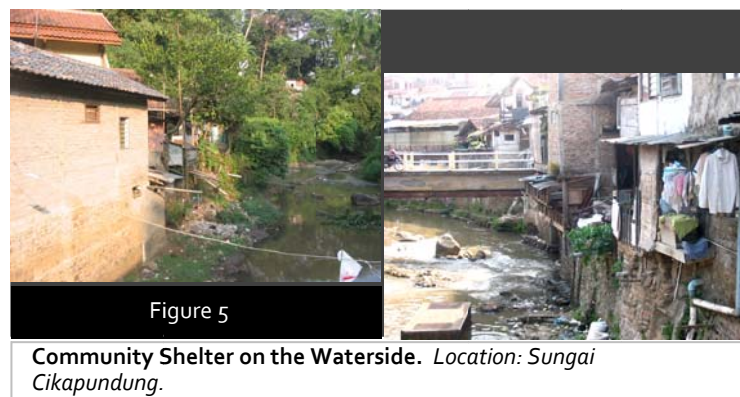
<sup>4</sup> Private activities might be carried out privately in private area, i.e. a space that produce for limited activities and limited access for public that established legally. See Paulus Hariyono, *Sosiologi Kota untuk Arsitek*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2007, page 134.

<sup>5</sup> Mean as “*Rukun Warga*”, a community or grass root institution, that the leader is elected by community.



- *The Usage of Riversides*

Water side or river side actually is a state owned region but frequently uses in illegal manner to the local regulation. Perda<sup>6</sup> No 8/2002 (changed to Perda No. 20/2005) specifies that the border of water/river side can not be used for or owned by individual or business institution/activities. In river side border line, no individual or private institution allowed to build any building.



From our observation in 3 spots, it is infrequent the riverside used as public space, but, if it is found as a public space, the condition frequently is very poor. Riverside as a public area has not been managed for community activities, although this area is risky for illegal shelter by the new migrants.

---

<sup>6</sup> *Perda* is abbreviation of *Peraturan Daerah* or Local Regulation, licensed by Kota or Kabupaten.



Figure 5

**Utilizing riverside as public space.**

**Location:** Left: *Sungai Cikapundung*; Right: *Kelurahan Sukapada*. (Source: *Private Documentation*)

Not only poor houses usually dominated on river side area, but also many permanent housing and commercial buildings established by legal license seem free from legal problem. Solving the problem needs comprehensive policies and community control for community awareness of river side area importance for future and wider collective goals.

- *Park and Private Spaces*

High land density area such as *kampung-kota*, and traditionalism of culture in urban area, offers a close communal relationship of community. Community tricks scarcity of space by using their own private space such as frontage parks or terrace for interact each other, and for social communication or informal and individual intimate communication. Social communication as a social need cannot be replaced by any other things, also for mutual recognition, sharing, have a chat, or *curhat*.<sup>7</sup>



Figure 5

**Terrace and facade as public area.**

(Source: *Private Documentation*)

<sup>7</sup> *Curhat* (curahan hati), a term that trendy used by teenager for sharing, telling self-problem in an intimate relationship. Women and female teenager frequently *curhat* in neighborhood community—although it is just as an informal conversation, but phycologically, curhat may reduces stress and depression, because the poorest community is a voiceless group frequently feel as a stranger and has no way out to solve his/her problem.

It is easy to see in *kampung-kota* area, women have their own tradition to share, have a *chat* or *gossip* as a “ritual” in *kampung-kota* neighborhood. It is usually done in 10.00 am – 12.00s am after they have carried out household activities, such cooking, washing or cleaning room, a free period before praying time and the children return from school or before *magrib*.

After cooking or washing, women like to spend their time in terrace to have a chat with their neighbors. Except it is only an informal talks or gossip, alongside care their baby or kids, but these activities have a valuable function in social relation as a ‘social capital’ in closing up relationship and neighborhood.

### ***Boundary Aspects: Empowerment of Gender Economy, Environment, and Institution to Recover Public Space***

Community is an assembly of groups or individuals with difference character, culture, education level and economic background in a very competitive climate with lack of resources. Because of rapid population growth, housing economy of city raises social problem, violence, and deteriorates natural resources, and causes environment capacity support turn down, as well as, evokes higher living cost in suburban area and poverty. Therefore, it is needs recovery process of environment to recover quality of life and better condition for poor groups. So, conventional approach is has no longer effective to solve this problem, because it tends to focus in physical aspect of urban rather than culture or social phenomenon.<sup>8</sup> Therefore, recovery of public space as a physical/infrastructure element required the boundary aspects to support sustainable recovery process.

- ***Gender Economy Empowerment***

Economy empowerment focused on gender or women group as affected group because women are closer to public space utilization dimension, environmental problem and more domestic than men. So, to support economy of women is intended to support domestic problem of economy on the basic needs or material such livelihood or household expenditures. The program is developed by establishing women informal group of business to sell rice and cocounut oil in lower price than market that have a continuing demand of rices and fried oil condition. The group is established for women based on PKK<sup>9</sup> institution as a local institution, by which

---

<sup>8</sup> As Danisworo specify “*kelemahan yang sering dilakukan oleh perencana dan perancang kota adalah bahwa mereka lebih sering melihat kota sebagai “fenomena fisik” ketimbang “fenomena budaya”*. Akibatnya, banyak dimensi lokal yang menyangkut nilai-nilai sosial budaya, esetika, sejarah, serta nilai-nilai simbolis lainnya yang disalahartikan, diabaikan, bahkan dianggap tidak penting di dalam proses perancangan.”, *Tabloid Agora, Volume 01, Edition 01 September 2007*, Pusat Studi Urban Desain (PSUD).

<sup>9</sup> *PKK* is acronym of *Pendidikan Kesejahteraan Keluarga* (family wealth organization), a local institution for women in community. *PKK* was launched in Suharto era to support contraception

members and administrator elected by women. By 1 billion rupiah as a first working capital, the group succeed to sell more than one ton rice every week.



Empowerment in grass root economy with micro-business units development requires suitable business environment physically or social (micro or macro policies) to encourage more wide growth for informal/micro business. We need to identify local financial and non-financial resources that community can developed by their own capacity, and respectively the policies should be set up to have more access of other outside resources and market.

- *Environmental Aspect*

Bad sanitation and poor access for fresh water, requires comprehensive environmental management to recover poor environment condition. Almost of river in Bandung, included observation areas, contaminated by waste from industry or households, affects unpleasant panorama in riverside (almost slum and dirty), although riverside frequently covers high density shelter by poor residents. Primarily, poor community in *kampung-kota* delivers their domestic waste to river by pipes that caused river is contaminated. Although housing uses safetic tank, causes almost dwell risky to containinated. High deforestation on conservation area in Bandung and high covering of built area, reduces soil water availability, and almost of households in RW 16 Kelurahan Sukapada are colored and have appalling smell.

More open to access and more available of infrastructures, and more suitable environmental management that accessible for community to develop its own economy, and architectural design should solve the problem. The goal of empowerment process on environmental aspect supports public space management and recovery to set up public space more responsive, functional and sustainable.

---

program, but politically used its supported Golkar Party influence in grass root. But, in present, this institution functions as for community health program.



**Figure 5** Environmental improvement, community cooperation is very important to recover environmental condition (Location: Babakan Baru RW 16 Kelurahan Sukapada. Source: Private Documentation)

- Developing Local Institution*

The uses of local institution not only for cultural purposes, but also to provide institutionalization process of social norms in improving social life. Because, building communal trust, cooperation, collective participation requires institution. More secure environment, as example, can reduce criminality and raise secure feeling. At last, it is necessary to develop local governance primarily in local institution or lowest level of government organization to facilitate participative development process.<sup>10</sup>
- Networking*

The poorest group is often as voiceless group, with low access to other outsiders stakeholder or upper structures. We advocates affected community to access outsiders networking by arranging community meetings with local officials, legislature, or NGO's.



**Figure 6** Community meeting arranged to discusse with an NGO

<sup>10</sup> As an example, subsidy of stove by government for poor group executed in 2007 requires all beneficiaries be granted and the poorest must receive first. In community, this program is executed by community administrator.

## Model for Public Space Management

The wider function of public space as public area, a clearance area for *kampung-kota* community and for economic activity, therefore, public space is a method for social capital revitalization intervention method. As facilitating media for public activities, public space recovery is a medium for development planning at community level, and participative development may start from public space management.

### Problem Structure

Generally, there are two sets of problems of public space identified, i.e. lack of availability and poor quality of public space. These problems (causes and effect) are structured in two arrays respectively. The recovery model<sup>11</sup> for public space in *kampung-kota* is described below.

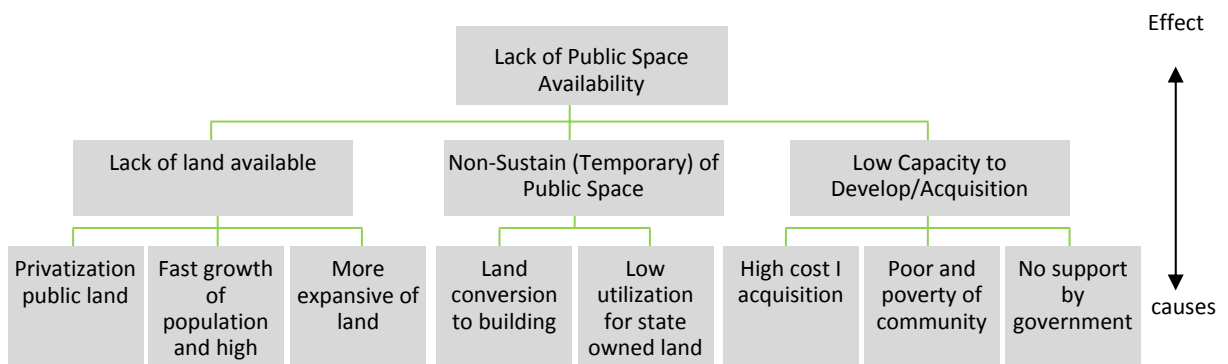


Figure 7

**Problem #1:** Lack of public space in *kampung-kota* (Source: Analysis)

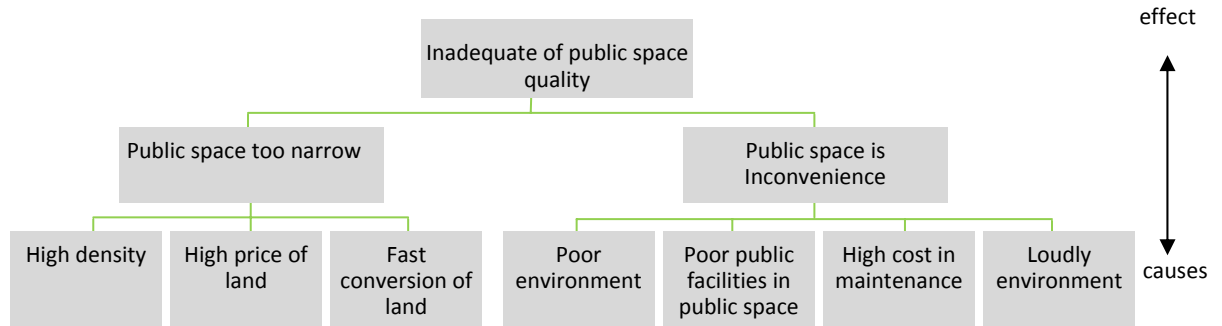


Figure 8

**Problem #2:** Poor quality of public space in *kampung-kota* area (Source: Analysis)

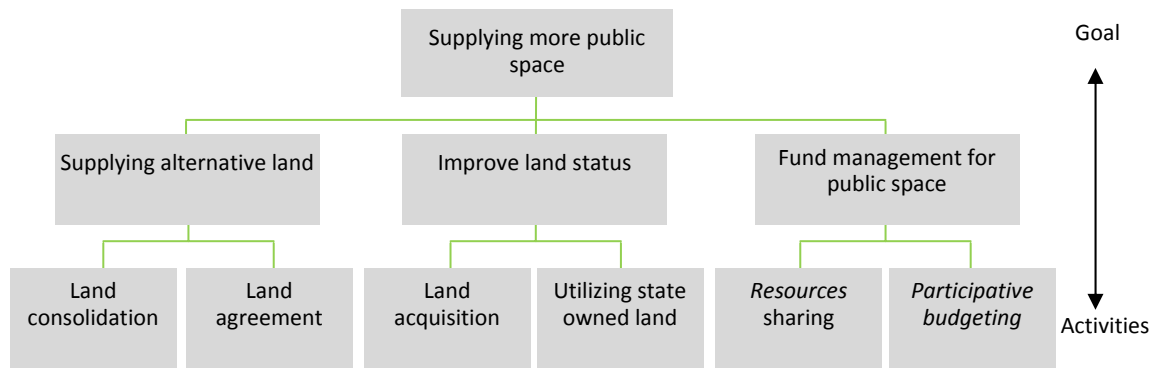
<sup>11</sup> We utilize *logical framework approach* (LFA) for structuring problems, array strategies and develop program for revitalization or management of public space in *kampung-kota* area.



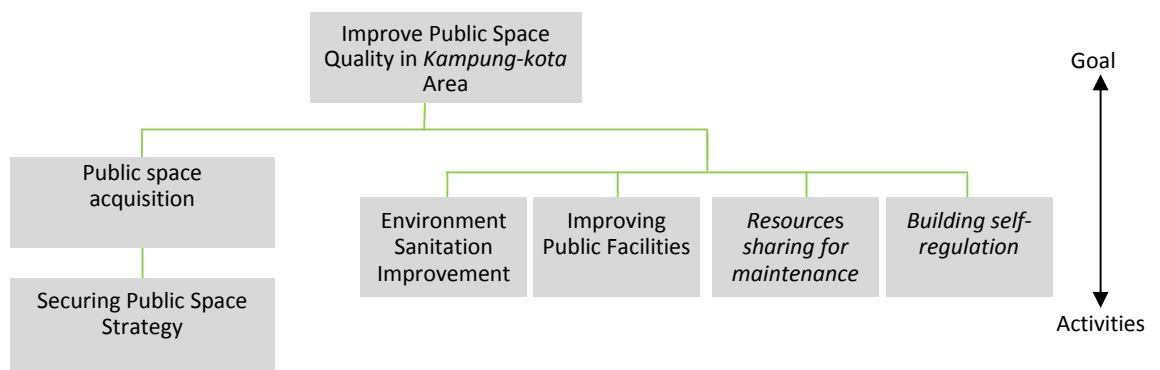
Beside that, inappropriate of public space in urban area are caused by fewer of land available for adequate public space, inconvenience, dirty, and low public facilities.

*Strategy*

Two strategies to recover public space in *kampung-kota* area proposed are improving of supplying more public space and improving its equality.



**Figure 9** Strategy #1: Public Space Management in Kampung Kota Area (source: analysis)



**Figure 10** Strategy #2: Improving Public Space Quality in Kampung-kota (source: analysis)

## Design

Design framework for public space is formulated below.

**Table 1.** Design Framework for Public Space Developed Research Location

No	Activity	Details	Output
1	Planning and designing public space	<ul style="list-style-type: none"> <li>Observing focused on design spot</li> <li>Re-identification community activities space need</li> <li>Verifying requirement and conditions for environmental sustainability on the riverside</li> <li>Calculating materials</li> <li>Design figure of public space</li> </ul> <p><u>Note:</u> <i>This process is carried out by consensus with the architect and the community</i></p>	<p>Public Space Design figure:</p> <p><i>Concept:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Site analysis</li> <li>Matrix for activities space required</li> <li>Sketching of users behavior</li> </ul> <p><i>Working figures:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Landscape design</li> <li>Site plan</li> <li>Segmented site plan</li> <li>Structure and construction</li> <li>Drainage system design</li> <li>Design of armature/street furniture</li> <li>Figure details</li> <li>Technical specification</li> </ul>
2	Implementing Public Space Design	<ul style="list-style-type: none"> <li>Road access improvement and management</li> <li>Building of water side construction (in cooperation with Dinas Pengairan Kota Bandung)</li> <li>Management of river side (boulevard) as a green path (In cooperation with Dinas Pertamanan Kota Bandung and NGO's)</li> <li>Building public facilities by the community with green friendly of materials</li> <li>Management for sewerage system by implementing communal septic tank (in cooperation with BPLH Kota Bandung)</li> </ul> <p><i>Note: The processes are carried out by public-private partnership model</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riverside as a community boulevard is managed that can be functioned as green path</li> <li>Cover of green area in the community (such as green parks, green medicine, or vegetables) in riverside area and household.</li> <li>Public space is provided supported with adequate public facilities for community activities (such as chairs, kids playing equipments, park area, and side for non permanent depot/store).</li> <li>Drainage system is managed by building communal septic tank</li> </ul>



## Final Notes

Revitalization of *kampung-kota* public space can not be carried out without exploring other aspects surrounded, environment, economy, and institution in community. Community architecture in public space management in slum area should analyze social problem and approaching it by participative process to give more responsive, democratic and functional of public space in *kampung-kota* area that has poor access to land. *Kampung-kota* has lack of public space by minim available and poor quality of public space requires participation process to improve capacity of the poorest to access more land in high competitive situation of land, to facilitate the poorest to learn of participatory development process in order to advocate its capacity to better living by institutional aspect, networking, and economic engagement. Design of public space requires participative process to make public space more democratic, responsive and functional.

## REFERENCES

- Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian Action (ALNAP) (2003), *Participation by Crisis-Affected Populations in Humanitarian Action, a Handbook for Practitioners* (www.alnap.org)
- Adisasmita, Rahardjo (2006), *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan: Konsep dan Model Community Development*. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS), (2006), Laporan *Studi Modal Sosial*.
- Carr, Stephen; Francism Mark; Rivlin, Leane; Stone, Andrew (1992), *Environment and Behavior Series. Public Space*. Cambridge University Press.
- Danisworo, Mohammad (2004), *Pemberdayaan Ruang Publik Sebagai Tempat Warga Kota Mengekspresikan Diri , Kawasan Gelora Bung Karno*. Makalah pada Seminar dan Lokakarya Pemberdayaan Area Publik di Dalam Kota yang diselenggarakan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI).
- Day, Christopher (2003), *Consensus Design Socially Inclusive Process*, London: Architectural Press.
- Francis Fukuyama (1995), *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*, London: Hamid Hamiltond Ltd.
- Frick, Heinz dan Suskiyatno, Bambang FX (1998), *Dasar-Dasar Eko-Arsitektur*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Hariyono, Paulus (2007), *Sosiologi Kota untuk Arsitek*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Healey, Patsy, et. al (ed.) (1995), *The New Urban Context, Managing Cities*. John Wiley & Sons.

- Inoguchi, Takashi; Newman, Edward; Paoletto, Glen (ed.), (2003), *Kota dan Lingkungan: Pendekatan Baru Masyarakat Berwawasan Ekologi*, Jakarta: LP3ES.
- Khudori, Darwis (2002), *Menuju Kampung Pemerdekaan: Membangun Masyarakat Sipil dari Akar-Akar, Belajar dari Romomangun di Pinggir Kali Code*, Yogyakarta: Yayasan Pondok Rakyat.
- Kompas (2006), *Politik Kota dan Hak Warga Kota*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Laurens, Joyce Marcella (2004), *Arsitektur dan Perilaku Manusia*, Jakarta: Penerbit Grasindo.
- Putnam, Robert (2000), *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*, New York: Simon and Schuster.
- Setiawan, Mobi B (2004), *Ruang Publik dan Modal Sosial: Privatisasi dan Komodifikasi Ruang di Kampung*. Makalah pada Seminar dan Lokakarya Pemberdayaan Ruang Publik di Dalam Kota, Ikatan Arsitek Indonesia.
- The World Bank (1996), *The World Bank Participation Sourcebook*, Washington DC, see [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org)
- Wiryomartono, A. Bages P (1995), *Seni Bangunan dan Seni Bina Kota di Indonesia*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Zahnd, Markus (1999), *Perancangan Kota Terpadu, Teori Perancangan Kota dan Penerapannya*. Yogyakarta: Kanisius.